



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SEMENTARA
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN**

**KOMITE I DPD RI, MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI KEUANGAN RI,
MENTERI PPN/BAPPENAS RI DAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Rabu, 9 Februari 2022
Waktu Rapat	: 10.38 WIB s.d 11.44 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., m.t. (F-PAN)
Acara Rapat	: - Laporan Panja 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi ke Raker TK I; - Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah; dan - Penganbil Keputusan dan Penandatanganan Draf 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi.
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
Hadir	: 41 dari 52 orang Anggota dengan rincian

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. Luqman Hakim, S.Ag.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

9 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta, S.H.
5. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.
6. Ihsan Yunus
7. H. Yadi Srimulyadi
8. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
9. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeni Relawati R. W., M.Si.
4. A.A.Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.
2. Drs. Supriyanto
3. H. Rahmat Muhajirin
4. Prasetyo Hadi
5. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. H. Subadri, S.H., M.H.

3. Drs. Y. Jacki Uly, M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
2. Drs. Mohammad Toha, S. Sos., M.Si.
3. M. F Nurhuda Y

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E.
2. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
3. Anwar Hafid
4. H. Zulkifli Anwar
5. Rezka Oktoberia

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
3. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalluddin
3. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

C. LEMBAGA NEGARA:

1. Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian PPN;
5. BAPPENAS RI.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Yang kemudian selanjutnya kita langsung pengambilan keputusan Tingkat I, lalu baru kemudian sebelum ditutup kita akan lakukan penandatanganan atau pengesahan dalam RUU ini. Apakah kita bisa setuju Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Saya juga meminta persetujuan waktu, sekarang ini kita berada di Pukul 10.43 WIB, mudah-mudahan kita bisa selesaikan Pukul 11.30 WIB ya, setuju ya? Karena Pak Menteri juga akan menghadiri rapat terbatas dengan Presiden. Setuju ya Pak ya?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.38 WIB)

Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Pak Saan untuk melaporkan hasil kerja dari Timus dan Timsin kepada kita Anggota Panja dari 7 rancangan undang tentang Provinsi.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (SAAN MUSTOPA, M.Si./F-NASDEM):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang Saya hormati Pimpinan dan Anggota Panja tentang tujuh RUU tentang Provinsi,

Yang Saya hormati perwakilan dari pemerintah dalam pembahasan tujuh RUU tentang Provinsi,

Yang Saya hormati perwakilan dari DPD RI semuanya dan,

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Tentu pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional kita dalam keadaan *sehat wal'afiat* di tengah-tengah covid varian Omicron yang sedang meningkat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan terhindar dari terpapar covid-19.

Menindaklanjuti Rapat Panja RUU Tujuh Provinsi tanggal 8 Februari Timus, Timsin, telah melakukan perumusan dan sinkronisasi terhadap tujuh RUU tentang Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 8 Februari 2022. Dari hasil perumusan dan sinkronisasi tersebut Timus, Timsin, melaporan ke Panja sebagai berikut.

Pertama, ruang lingkup, sistematika dan materi muatan-muatan RUU terdiri dari tiga Bab, delapan Pasal. Bab pertama tentang Ketentuan Umum, Bab kedua menyangkut tentang cakupan wilayah, Ibukota dan karakteristik dan ketiga Ketentuan Penutup.

Dari hasil pembahasan di Timus, Timsin terkait dengan soal penyusunan dasar hukum telah kita sepakati dan menyisakan terkait dengan soal cakupan wilayah dan karakteristik dari Provinsi dan itu pun sudah disepakati secara bersama-sama. Itu yang kami ingin sampaikan.

Terima kasih.

Mohon maaf, demikian laporan Timsin, Timus terkait RUU tentang Tujuh Provinsi.

***Wabillahitaufik Wal Hidayah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Saan Mustofa.

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan laporan dari Timus dan Timsin yang tentu semua itu sudah menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang yang sudah kita susun *draft* terakhirnya.

Selanjutnya hasil Timus dan Timsin itu juga sudah di terima oleh Panja dan kemudian Panja juga sudah menyusunnya kembali. Oleh karena itu seperti yang kita rencanakan, tadi malam kita juga sudah menyusunnya kembali semua dari rumusan dan sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Timus dan Timsin ya tentu bekerjasama dengan pemerintah.

Oleh karena itu kita dengarkan laporan dari Panja kepada kita di Rapat Kerja kita.

Silakan Pak Junimart Girsang.

KETUA PANJA RUU TENTANG TUJUH PROVINSI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H./F-PDIP):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara.

Bapak/Ibu sekalian,

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi II DPR RI juga memandang perlu mempertimbangkan pembentukan peraturan perundangan yang mengatur pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana hal ini bisa diatur dalam satu undang-undang tersendiri.

Mengingat daerah memiliki karakteristik masing-masing, bahwa setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya tersendiri, tidak digabung dalam satu undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang setiap-setiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dengan dibentuknya undang-undang ini akan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang efektif di masing-masing provinsi, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia Nomor R54/Pres/11/2021 tanggal 20 November 2021 perihal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang dan berkenaan dengan hal tersebut pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara tersendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.

Serta berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 15 Januari 2022 dengan surat dari Pimpinan DPR RI No. P/69/PW/11.01/01/02 tanggal 8 Januari 2022 memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap Tujuh Rancangan Undang-Undang dan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Barat
2. Provinsi Kalimantan Selatan
3. Provinsi Kalimantan Timur
4. Provinsi Sulawesi Selatan
5. Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Provinsi Sulawesi Tengah
7. Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan antara DPR RI, DPD RI dan pemerintah, ruang lingkup, sistematika dan materi muatan terdiri dari Bab I tentang Ketentuan Umum yang mengatur tentang definisi provinsi, tanggal pembentukan atau hari kelahiran dan dasar hukum pembentukannya.

Bab II tentang cakupan wilayah ibukota dan karakteristik yaitu mengatur tentang jumlah kabupaten dan kota yang menjadi cakupan wilayah masing-masing provinsi, Ibukota masing-masing provinsi, karakteristik berupa karakter wilayah geografis dan karakter suku bangsa dan kultural.

Bab III tentang ketentuan penutup yang mengatur tentang pencabutan Undang-Undang No. 21 Tahun 1958, pencabutan Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 Tahun 1964 dan terkait dengan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapak/Ibu sekalian,

Demikian Laporan Panja Komisi II DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanah undang-undang.

Oleh karena itu kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Hukum dan HAM DPD RI serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Panja ini kami haturkan terima kasih.

***Wabillahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Junimart Girsang.

Setelah kita mendengarkan tadi laporan dari Timus, Timsin dan hasil dari Timus, Timsin itu kemudian disempurnakan dalam Panitia Kerja masing-masing Tujuh Rancangan Undang-Undang tertuju Panja Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ini maka agenda selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pendapat akhir mini fraksi setelah itu nanti kami persilakan Komisi I dan pandangan terakhir dari pemerintah.

Saya mau bertanya dulu sebelum kita laksanakan, tadikan kita persilakan masing-masing fraksi, tentu masing-masing kita sudah mempunyai draftnya ya tetapi saya yakin lebih banyak mukadimahnya dibandingkan perkataan setujunya, karena cuma dua *cluster* saja.

Nah, saya mengusulkan ya, nanti saya persilakan, dari tadi yang sudah disampaikan Timus dan Panja ini. Saya tanya setuju atau tidak setuju saja, kalau setuju nanti tolong Bapak-bapak yang mewakili masing-masing poksi menyampaikan langsung ke depan saja, kalau dibacain nanti pasti 80%-90% mukadimahya, yang tadi itu isinya sudah sama. Bisa kita setuju ya Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H):

Izin Pimpinan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyetujui.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan.

Terima kasih Pak Rifqi.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Golkar, Pak John.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Bismillahirrahmanirahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang Saya hormati,
Yang mewakili pemerintah yang Saya hormati,**

Setelah mendengarkan paparan dari Timus, Timsin dan laporan Panja kepada kita, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim*. Partai Golkar setuju untuk dilakukan proses selanjutnya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Proposalnya menyusul Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke nanti nyusul, nanti nyusul.

Terima kasih.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (PRASETYO HADI):

Terima kasih.

Saya mewakili Fraksi Partai Gerindra dalam kesempatan yang berbahagia ini bulat, menyetujui dan mendukung.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Prasetyo.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

**Bapak Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Komisi II yang Saya hormati,
Yang mewakili pemerintah dan dari DPD yang mewakili juga,**

Kami dari Fraksi Nasdem setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Pimpinan tadi kami seluruhnya menyetujui apa yang disampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Jacky Uli yang mewakili Fraksi Partai Nasdem.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos., M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua.

Sebelum menyampaikan persetujuan, saya sampaikan *Assalamu'alaikum Warahmatullahi* kepada Pimpinan dan para Anggota DPD, Mitra, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM.

Saya minta satu menit Ketua untuk menegaskan sebenarnya, menegaskan catatan-catatan kami dari Fraksi karena ini menjadi amanah yang harus saya sampaikan meski pun sudah tertulis ini biar agak difokuskan, terutama adalah catatan-catatan kami kepada para hadirin sekalian, yakni RUU ini sebagai bagian dari pengakuan atas eksistensi setiap wilayah menjadi apa namanya penegakkan itu.

Kemudian yang kedua catatannya agar wilayah diberikan kewenangan melakukan penataan kelembagaan wilayah adat.

Yang ketiga catatannya adalah pengaturan terkait batas wilayah.

Yang keempat wilayah diberi kewenangan seluas-luasnya melakukan inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan potensi tentunya.

Yang kelima adalah wilayah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola potensi energi terbarukan ini yang enggak pernah terwujud bertahun-tahun ini, sudah ada programnya.

Yang keenam memandang peraturan ini dapat menjadi kekuatan daerah untuk menyelesaikan setiap konflik.

Kemudian yang ketujuh adalah yang terakhir ini memberikan perhatian kepada wilayah terutama wilayah atau daerah perbatasan sebagai wujud pembangunan wajah Indonesia dihadapan negara-negara tetangga.

Itu saja catatan-catatannya.

Kemudian tentunya dengan mengucap *Bismillahirrahmanirahim* Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya dan RUU tentang Provinsi Kalimantan dan seterusnya ini selanjutnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya serahkan pandangan mini fraksi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nurhuda yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos., M.Si.):

Saya, M. Toha.

KETUA RAPAT:

Muhammad Toha, sorry-sorry. Tetapi namanya kok, sudah ada sorry-sorry.

Terima kasih Pak Mohammad Toha.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Partai Demokrat.

F-PD (ANWAR HAFID):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera kepada kita semua.

Om Suasti Astu.

Name Budaya.

Salam Kebajikan.

Pada kesempatan ini izinkan saya, Bapak Pimpinan menyampaikan pendapat akhir mini Fraksi Partai Demokrat. Tentu ini alasannya Panja

semuanya tetapi intinya sebagaimana yang sudah dibahas oleh Timsin dan juga dari laporan Panja.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional serta Hadirin yang Kami hormati,**

Setelah mengikuti rangkaian pembahasan daripada tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi ini, maka Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya menyetujui, ketujuh rancangan undang-undang ini untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi undang-undang.

Dengan catatan:

Yang pertama, bahwa perubahan atas hukum ke tujuh provinsi tersebut kita harapkan itu menjadi sebuah awal yang sangat baik dalam kita melakukan penataan kembali terhadap pembentukan daerah-daerah yang diselaraskan dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.

Yang kedua, bahwa naskah final tujuh rancangan undang-undang pembentukan provinsi ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan daerah yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti meliputi pengaturan batas dan cakupan wilayah serta jumlah kabupaten/kota yang dipastikan secara tepat dengan melihat kondisi terkini di wilayah tersebut.

Yang ketiga Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa dalam undang-undang ini karakteristik masing-masing provinsi bisa terakomodir dan dijamin dalam undang-undang seperti karakteristik alam dan wilayah yang meliputi kawasan rawan bencana misalnya seperti di daerah Sulawesi istimewa. Wilayah daratan dan wilayah perarian dan sebagainya.

Inilah tiga catatan yang kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan aturan-aturan turunan dari undang-undang ini kedepan akan lebih memberdayakan daerah sehingga hakekat otonomi daerah yang menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa terwujud.

Demikian Pandangan Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat, Jakarta 9 Februari 2022, Pimpinan Fraksi Partai Demokrat/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Doktor Eddy Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Marwan Cik Hasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Anwar Hafid yang mewakili Fraksi Partai Demokrat.

Kata Pak Junimart batiknya bagus, warnanya warna Nikel lagi. Tadi saya lupa mengatakan Pak Niki bajunya bagus, warnanya warna Batubara.

ANGGOTA DPR RI:

Keduanya lagi naik harganya Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Keadilan Sejahtera.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Bismillahiramanirahim.

Assalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Saya hormati Pimpinan dan Anggota, Pemerintah, Komite I DPR RI,

Sebelum saya menyimpulkan mungkin satu saja catatan kami yaitu berkaitan dengan adanya ruang inovasi dan ruang kolaborasi sehingga terbuka dinamisasi di daerah, itu catatan kita ya, karena kita memahami bahwa daerah sangat memerlukan ruang-ruang seperti itu.

Karena itulah kemudian dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucapkan *Bismillahirahmanirahim*, Fraksi Keadilan Sejahtera menyetujui rancangan tujuh undang-undang provinsi ini untuk di proses lebih lanjut lagi.

Demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Teddy Setiadi yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang Saya hormati,
Yang Saya hormati Ketua beserta Anggota mewakili Komite I DPD RI,
Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemerintah yang hadir pada kesempatan yang
berbahagia hari ini,
Hadirin dan Hadirat yang Saya muliakan,**

Menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Timus dan Panja yang sudah melaporkan kepada kita bersama, maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim* dapat menerima Rancangan Tujuh RUU Provinsi yang sudah dibacakan tadi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Barangkali demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Guspari Gaus, batiknya juga bagus, warna rendang, tetapi rendang Lapo bukan Sumbar.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi II sekaligus Pimpinan Rapat
pada hari ini, dan
Yang kami hormati rekan-rekan Anggota Wakil Pimpinan dan seluruh
Anggota Panja,**

Kami berbahagia tentunya pada hari ini hadir di tengah-tengah kita, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Pak Sekjen Dalam Negeri dan yang mewakili Kemenkumham dan dari Komite I DPD RI dan dari Kementerian Keuangan dan seluruh jajaran yang hadir saat ini.

Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa setelah kita marathon melakukan Rapat Panja dengan pembahasan RUU tentang Pembentukan Tujuh Provinsi di Sulawesi dan di Kalimantan, maka kami dari Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan akhir, pendapat akhir Fraksi dari Partai Persatuan tersebut terhadap laporan panja yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, baik diperkuat dengan laporan dari Tim Sinkronisasi yang juga sudah disampaikan kepada kita.

Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa berdasarkan apa yang sudah disampaikan kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim* saya memohonkan ridho dari Allah SWT Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyetujui penyusunan RUU Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara serta RUU Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disampaikan untuk dibahas pada agenda berikutnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Golkar untuk menyerahkan pandangan mini fraksinya.

Terima kasih Pak John Kennedy Aziz.

Selanjutnya kami persilakan pendapat akhir dari Komite I DPD RI.

KOMITE I DPD RI (FAHRUROZI KOMITE I DPD RI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Om Suasti Astu.

Name Budaya.

Salam Kebajikan.

**Yang Kami hormati Ketua Komisi II DPR RI dan juga Pimpinan,
Menteri Dalam Negeri,
Menteri PPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia,**

**Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Keuangan serta seluruh hadirin yang Kami muliakan,**

Saya bacakan langsung. Pertama DPD RI menghargai, yang kedua DPD RI mengapresiasi dan yang ketiga DPD RI menyetujui.

Terima kasih.

***Wabilahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Fahrurozi Ketua Komite I DPD RI. Terima kasih sekali lagi Pak Fahrurozi, Pak Fired dan Pak Marsiat yang mengikuti rapat-rapat kita dari kemarin.

Selanjutnya terakhir kami persilakan pendapat akhir dari pemerintah. Kami persilakan Pak Menteri Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN.) PROF. DR. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., PH.D.):

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua.
Om Suasti Astu.
Name Budaya.
Salam Kebajikan.***

**Yang Kami hormati, yang Kami muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili,
Menteri Keuangan RI atau yang mewakili,
Menkumham atau yang mewakili,
Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia,**

Dalam kesempatan ini kami pertama-tama memohon maaf karena hadir secara virtual karena baru saja tiba dari tugas di luar kota dan mungkin sebentar lagi kami harus mundur untuk mengikuti rapat yang di pimpin oleh Bapak Presiden. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada

Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI yang telah mengagendakan Rapat Kerja ini dan juga kepada Panja Tujuh RUU beserta Timus dan Timsin yang telah bekerja keras menyelesaikan draft RUU. Dan juga ucapan penghargaan kami sampaikan kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya ini yang baru saja kita lihat bersama.

Izinkan kami menyampaikan pendapat akhir. Yang pertama, pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI atau setuju RUU dimaksud dan setuju dilakukan pembahasan yang pada awalnya dengan catatan hanya terbatas pada penyesuaian dasar hukum.

Kedua, namun seperti kita ketahui bersama sesuai dengan dinamika pembahasan yang berkembang sepanjang Rapat Panja pemerintah bersama dengan Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI bersepakat tambahan dua substansi sehingga RUU disepakati berikut tiga substansi yaitu terkait penyesuaian dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan karakteristik daerah.

Selanjutnya kami sekali lagi menyampaikan setuju dan menyerahkan kepada Pimpinan untuk tahapan selanjutnya sebagaimana yang telah diagendakan.

Demikian pendapat akhir kami, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan, perlindungan kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri yang mewakili pemerintah, yang menyampaikan pendapat akhirnya tentang Tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi.

Selanjutnya setelah kita tadi mendengarkan semua pandangan mini dari masing-masing fraksi, kemudian pandangan akhir dari Komite I DPD RI dan juga pandangan akhir dari pemerintah.

Oleh karena itu saya ingin menanyakan dan meminta persetujuan dari kita semua, apakah setelah kita menyelesaikan pembahasan bersama tentang Rancangan Undang-Undang Provinsi Sulawesi Selatan, Rancangan Undang-Undang Provinsi Sulawesi Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Timur, kita dapat setuju menjadi Draft Final Rancangan Undang-Undang dalam pembicaraan Tingkat I ini dan

selanjutnya kita akan usulkan kepada Paripurna untuk menjadi Usul Inisiatif DPR RI. Setuju? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian,

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E.):

Izin Ketua, kan tadi sudah setuju, saya mau sampaikan sedikit dengan Pak Prima ini mumpung ketemu.

KETUA RAPAT:

Apa itu? Pak Prima siapa?

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E.):

Itu Pak, yang di ujung sana.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E.):

Terima kasih Ketua,

**Yang terhormat Pimpinan Komisi II dan Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Dalam Negeri,
Komite I DPD RI,**

Mohon maaf saya agak menyela sedikit di tengah kesibukkan kita membahas revisi undang-undang tujuh provinsi ini, karena kesulitan saya untuk bertemu dengan Pak Prima ini Pak. Pak Prima ini adalah orang yang paling bertanggungjawab terkait kesejahteraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Republik Indonesia. Karena beliau adalah Dirjen Perimbangan Keuangan yang mengatur lalu lintas transfer daerah, ya, *Alhamdulillah* sudah kami undang tiga kali ke BAKN tidak pernah hadir.

Jadi, saya agak malu sebenarnya dengan Komisi II ini Ketua, diundang Komisi II datang terus Bapak ini, diundang BAKN tidak pernah hadir. Saya mungkin harus banyak berguru dengan Pak Dolly bagaimana mengundang Pak Prima, begitu kan.

Mungkin saya akan bertanya nanti kapan Rapat Komisi II yang akan datang dengan Pak Prima ini, sehingga nanti saya tempelkan waktunya ini Pak Ketua, jadi enggak ada alasan lagi bagi beliau untuk tidak hadir begitukan, karena memang buntutnya susah banget ini Ketua.

Itu saja terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wahyu.

Saya menambahkan, selain diundang Komisi II datang, selama rapat IKN datang terus Pak.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E.):

Alhamdulillah Ketua, terima kasih informasinya sangat berharga sekali.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Karena kita tadi sudah menyetujui tujuh rancangan undang-undang ini dan kita sudah sepakati akan kita sampaikan ke Rapat Paripurna untuk dilaksanakan Pengambilan Keputusan Tingkat II.

Oleh karena itu tiba saatnya kita untuk melakukan penandatanganan. Kami persilakan yang mewakili Menteri Dalam Negeri, kemudian Pak Menteri Dalam Negeri juga disana sudah bisa ikut tanda tangan. Disini paraf Pak Menteri Dalam Negeri kita buat dua Pak Menteri disana tanda tangan. Kemudian yang mewakili dari Menteri Kumham, yang mewakili Menteri Keuangan, yang mewakili Menteri Bappenas, virtual nanti bisa nyusul. Kemudian yang mewakili DPD, kemudian yang mewakili Kapoksi-poksi.

Terima kasih Bapak/Ibu sekalian para seluruh Pimpinan dan Kapoksi, kemudian Pak Menteri Dalam Negeri yang disana juga ikut menandatangani. Kemudian perwakilan dari DPD RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan selesainya kita tadi menandatangani semua rancangan naskah undang-undang dan kita sudah sepakati ini akan kita sampaikan ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan Pengambilan Keputusan Tingkat II maka Rapat

Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Tujuh Provinsi ini kita bisa nyatakan selesai.

Oleh karena itu sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Keuangan Republik Indonesia, kemudian Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pimpinan DPD RI yang diwakili oleh Komite I DPD RI dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahilahiribil'amin* maka Rapat Kerja ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.44 WIB)

Terima kasih.

Selamat Siang, Salam Sejahtera buat kita semua.

Wabilahitaufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Jakarta, 9 Februari 2022
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

TTD

**Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
196407261991032002**